

**Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2019-2022**

Talitha Nisriinaa Almira¹, Dedi Sukarno²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

talitha20005@mail.unpad.ac.id¹, dedi.sukarno@unpad.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to describe the regional financial independence of the Tasikmalaya City Government for the 2019-2022 fiscal year. Considering that the PAD of Tasikmalaya City is still at a low level in contributing to regional income in Tasikmalaya City in the 2019-2022 fiscal year compared to the element of transfer funds and the regional financial capacity of the Tasikmalaya City Government in managing all sources of local revenue is considered not optimal. This research uses a qualitative approach with a case study research design. This study uses the calculation of the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of PAD effectiveness, and the ratio of PAD efficiency which refers to the theory of Mahmudi (2016). Data collection techniques used in this research are documentation and interviews. The results of the research show that the Tasikmalaya City Government during the 2019-2022 fiscal year has an average regional financial independence is 23.46% with an instructive relationship pattern, the average degree of fiscal decentralization is 18.20% with a category of financial capability is less, the average financial dependence is still classified as very high with a ratio is 77.96%, the average effectiveness of PAD is 98.06% with a moderately effective category, and the average PAD efficiency is 1.82% with a very efficient category.

Keywords: *Regional Financial Independence; Regional Financial Ratio Analysis; Local Autonomy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya masih berada pada tingkat yang rendah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah di Kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2019-2022 dibandingkan dengan unsur dana transfer serta kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengelola seluruh sumber pendapatan asli daerah dinilai belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD yang merujuk pada teori Mahmudi (2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun anggaran 2019-2022 memiliki rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 23,46% dengan pola hubungan instruktif, rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 18,20% dengan kategori kemampuan keuangan kurang, ketergantungan keuangan daerah masih tergolong sangat tinggi dengan

rata-rata rasio sebesar 77,96%, rata-rata efektivitas PAD sebesar 98,06% dengan kategori cukup efektif, dan rata-rata efisiensi PAD sebesar 1,82% dengan kategori sangat efisien.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Analisis Rasio Keuangan Daerah; Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersirat bahwa konsep dari otonomi daerah yaitu adanya pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah untuk secara mandiri mengurus wilayahnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Indah, 2014). Penerapan kebijakan otonomi daerah ini dianggap menjadi salah satu strategi terbaik dalam meningkatkan kemajuan pembangunan dan meminimalisir kesenjangan antar daerah (Afandi & Sianipar, 2016).

Karakteristik paling menonjol ketika daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah ialah kemampuan keuangan daerah serta rendahnya tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat (Halim, 2001). Artinya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mampu mengoptimalkan serta menggali potensi sumber daya fiskal daerahnya untuk membiayai segala urusan pemerintahan maupun masyarakatnya. Dengan kata lain, suatu daerah harus dapat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama (Qisthina *et al.*, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur terkait pembagian sumber-sumber keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip "*money follow function*", artinya pelimpahan wewenang diikuti dengan pelimpahan atas sumber-sumber keuangan yang pada awalnya dikuasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat (Iskandar, 2022). Penetapan undang-undang ini berintikan untuk mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah yang dimaksud ialah tingkatan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mengelola serta menggali potensi sumber daya keuangan di wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan daerah tanpa harus bertopang atas bantuan dana dari pemerintah pusat (Nalle *et al.*, 2021).

Perwujudan desentralisasi fiskal pada prinsipnya menginginkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir. Sehingga, diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud ialah kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat tercermin dari besarnya penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerahnya. Sejalan dengan hal itu (Setiawan *et al.*, 2021) menyatakan peningkatan pada PAD, turut mendorong peningkatan terhadap

kemampuan daerah untuk membiayai urusan pemerintahan dan belanja rutin secara mandiri. Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah

Kota Tasikmalaya merupakan kota yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat menjadi daerah otonom. Kota Tasikmalaya dinilai memiliki sumber daya potensial yang cukup besar dalam memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Priangan Timur, baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Sehingga, diharapkan adanya optimalisasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap sumber daya potensial tersebut dapat meningkatkan pembangunan daerah serta pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik. Namun, Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah dengan baik dimana masih memiliki masalah terkait kemandirian keuangan daerahnya. Pada tabel 1 dapat dilihat proyeksi uraian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019 – 2022.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	PAD	Dana Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan Daerah (TPD)
2019	290.971.707.718	1.573.389.976.705	65.901.560.000	1.930.263.244.423
2020	314.307.017.302	1.376.288.904.396	70.311.500.000	1.760.907.421.698
2021	445.335.320.093	1.515.866.047.653	70.197.955.000	2.031.399.322.746
2022	341.362.213.700	1.475.175.680.746	85.905.872.252	1.902.443.766.698
Rata-rata	347.994.064.703	1.485.180.152.375	73.079.221.813	1.906.253.438.891
Persentase (%)	18,26	77,91	3,83	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 1, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya selama empat tahun terakhir memang cenderung mengalami kenaikan. Meskipun begitu, penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya bukan didasari oleh peningkatan PAD-nya. Dimana, pendapatan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya cenderung masih ditopang dari sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2019-2022, rata-rata kontribusi PAD Kota Tasikmalaya terhadap total pendapatan daerah diketahui hanya sebesar Rp347.994.064.703 atau 18,26%, sedangkan rata-rata pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah mencapai Rp1.485.180.152.375 atau 77,91% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut memberikan dugaan bahwa keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya mandiri dalam mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai tujuan desentralisasi fiskal yang menuntut pembiayaan bersumber dari daerah itu sendiri atau PAD, serta meminimalisir ketergantungan transfer dana transfer.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih rendah mengindikasikan adanya permasalahan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya belum dapat dioptimalkan. Salah satunya ialah belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan PAD Kota Tasikmalaya. Selain itu juga, rendahnya penerimaan PAD Kota Tasikmalaya disebabkan oleh BUMD di Wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya, yakni PD Pasar Resik dan PT BPRS Al-Madinah pada umumnya belum berpotensi secara efisien, serta kemampuan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif belum dapat dioptimalkan. Hal itu juga tentunya berimplikasi terhadap kurangnya penambahan terhadap penerimaan PAD di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan data dan uraian di atas, terdapat poin yang menjadi indikasi masalah, yaitu adanya ketergantungan dana transfer pusat dan provinsi memberikan pandangan sumber-sumber keuangan daerah yang belum dikelola dengan baik yang mengindikasikan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah Pemerintah Kota Tasikmalaya telah efektif dan efisien dalam mengoptimalkan keuangan daerahnya agar dapat mandiri secara finansial tanpa ketergantungan terhadap adanya bantuan pusat dan provinsi dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan daerah. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan sejauh mana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan, yaitu berupa penjelasan berbentuk narasi secara mendalam untuk dapat menjelaskan dengan baik terkait bagaimana kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2019-2022. Desain penelitian yang digunakan ialah studi kasus. Desain penelitian ini dapat menunjukkan secara jelas dimensi internal dan mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam menggunakan data yang beragam dan detail (Neuman, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022 yang telah diaudit, sedangkan teknik wawancara dilakukan dengan beberapa aparatur di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis data kualitatif dengan menggunakan model (Miles *et al.*, 2014) diantaranya kondensasi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan gambaran seberapa besar capaian kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio ini dihasilkan dari angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan transfer dari pusat dan provinsi (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio ini, maka akan mencerminkan kinerja pemerintahan yang baik dalam menjalankan kemandirian daerah. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022 dengan menggunakan teori Mahmudi (2016) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Tingkat Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2019	290.971.707.718	1.573.389.976.705	18,49	Rendah Sekali	Instruktif
2020	314.307.017.302	1.376.288.904.396	22,84	Rendah Sekali	Instruktif
2021	445.335.320.093	1.515.866.047.653	29,38	Rendah	Konsultatif
2022	341.362.213.700	1.475.175.680.746	23,14	Rendah Sekali	Instruktif
	Rata-Rata		23,46	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (diolah peneliti, 2024)

Tabel 2 menunjukkan nilai rasio kemandirian, kemampuan keuangan, dan pola hubungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2019-2022, dimana jika persentase rasio mampu mendekati angka 100 %, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal semakin rendah dan daerah dianggap mandiri secara keuangan guna membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik, berlaku juga sebaliknya. Dapat dilihat berdasarkan tabel 2, bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019 - 2022 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan persentase rasio kemandirian keuangan daerah terjadi di tahun 2020 dan 2021 dari 18,49% pada tahun 2019 menjadi 29,38% pada tahun 2022. Kondisi kenaikan tersebut terjadi sejalan dengan adanya peningkatan angka realisasi PAD di sepanjang tahun anggaran tersebut. Meskipun demikian, secara persentase rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya karena selama tahun anggaran 2019-2022 masih berada jauh di bawah 100% dengan rata-rata sebesar 23,46% dan termasuk kategori "rendah sekali" dengan pola hubungan "instruktif" yang menunjukkan pemerintah pusat masih memiliki peran lebih dominan dalam pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah

dibandingkan dengan kemandirian daerahnya sendiri atau dengan kata lain, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya, bahwasanya tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerahnya, ialah keterbatasan potensi yang dimiliki daerah dan belum memiliki diversifikasi pendapatan dari segi kepariwisataan yang diharapkan memberikan peningkatan terhadap penerimaan PAD. Sehingga, dampaknya Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat mengandalkan dana transfer untuk dapat merealisasikan kegiatan pemerintahan dan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat memberikan gambaran seberapa besar capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini dihitung dengan membagi angka realisasi PAD terhadap angka realisasi TPD (Mahmudi, 2016). Semakin besar hasil persentase rasio DDF, maka mencerminkan kinerja pemerintah yang baik dalam menjalankan desentralisasi fiskal. Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022 dengan menggunakan teori Mahmudi (2016) dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi TPD	DDF (%)	Kriteria
2019	290.971.707.718	1.930.263.244.423	15,07	Kurang
2020	314.307.017.302	1.760.907.421.698	17,85	Kurang
2021	445.335.320.093	2.031.399.322.746	21,92	Sedang
2022	341.362.213.700	1.902.443.766.698	17,94	Kurang
	Rata-Rata		18,20	Kurang

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (diolah peneliti, 2024)

Tabel 3 menunjukkan persentase rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022. Selama empat tahun tersebut menunjukkan rata-rata sebesar 18,20% dengan kemampuan masih berada pada posisi “kurang”. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2, bahwa setiap tahunnya derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya masih berada jauh di bawah angka 50%. Dengan kata lain, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Dimana, pada tahun 2019 tercatat memiliki persentase rasio yang paling rendah selama empat tahun anggaran tersebut dengan angka rasio sebesar 15,07%, sedangkan persentase rasio tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan angka rasio sebesar 21,92%. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal menunjukkan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu mendanai secara mandiri

pengeluarannya atau ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Tasikmalaya, bahwa rendahnya penerimaan PAD di Pemerintah Kota Tasikmalaya disebabkan karena kemampuan keuangan daerah yang rendah dalam menggali potensi yang ada, taraf hidup dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Akan tetapi, secara umum dilihat dari perkembangannya selama tahun 2019-2022 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif atau naik. Persentase derajat desentralisasi fiskal meningkat terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,07%. Kenaikan persentase derajat desentralisasi fiskal ini secara umum terjadi karena adanya peningkatan PAD sepanjang periode tersebut yang diukur kontribusinya terhadap TPD, meskipun masih sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatan transfer. Namun, kondisi tersebut dapat menunjukkan kinerja pengelolaan PAD di Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan.

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat memberikan gambaran mengenai capaian Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap ketergantungan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ini dapat dihitung melalui perbandingan angka realisasi dana transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) (Mahmudi, 2016). Semakin besar hasil rasio ini, maka ketergantungan daerah terhadap dana transfer semakin tinggi. Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022 dengan menggunakan teori Mahmudi (2016) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah
 Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019-2022**

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer	Realisasi TPD	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah(%)	Kriteria
2019	1.573.389.976.705	1.930.263.244.423	81,51	Sangat Tinggi
2020	1.376.288.904.396	1.760.907.421.698	78,16	Sangat Tinggi
2021	1.515.866.047.653	2.031.399.322.746	74,62	Sangat Tinggi
2022	1.475.175.680.746	1.902.443.766.698	77,54	Sangat Tinggi
Rata-Rata			77,96	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019 – 2022 tergolong “sangat tinggi” dengan rata – rata selama empat tahun sebesar 77,96%. Dengan kata lain, dalam melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya masih sangat

bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan pada setiap tahunnya persentase rasio ketergantungan keuangan daerah masih di atas 50%. Dimana, pada tahun 2019 tercatat memiliki besaran persentase tertinggi selama empat tahun, yaitu 81,51%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu 74,62%.

Tingginya tingkat ketergantungan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Tasikmalaya disebabkan karena realisasi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat tidak memungkinkan untuk dapat menutupi pembiayaan kegiatan pemerintahan di daerah, sehingga Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat membutuhkan dana transfer untuk dapat merealisasikan kegiatan pemerintahan tersebut yang meliputi pembangunan dan pelayanan kepada publik di Kota Tasikmalaya. Selain itu juga, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Tasikmalaya menyatakan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih sangat membutuhkan dana untuk dapat meningkatkan pelayanan agar dapat dilakukan lebih masif dan kecil hambatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dari tabel 4 dapat dilihat bahwa secara umum perkembangan ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan dengan kecenderungan yang negatif atau turun. Dimana, pada tahun 2019 memiliki rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 81,51% menjadi 78,16% di tahun 2020. Kemudian, di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 74,62%. Kemudian, di tahun 2022 rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan kembali sebesar 2,92% atau menjadi 77,54%. Oleh karena itu, dengan kata lain jika dilihat dari perkembangannya selama empat tahun tersebut, menunjukkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang mengartikan bahwa adanya peningkatan PAD dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi angka yang dihasilkan dari rasio efektivitas PAD, maka suatu daerah dapat dikatakan semakin efektif dalam melakukan pemungutan PAD. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dan target anggaran PAD (Mahmudi, 2016). Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022 dengan menggunakan teori Mahmudi (2016) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2019	290.971.707.718	297.684.061.430	97,75	Cukup Efektif

2020	314.307.017.302	298.366.800.979	105,34	Sangat Efektif
2021	445.335.320.093	450.811.458.802	98,79	Cukup Efektif
2022	341.362.213.700	377.696.438.409	90,38	Cukup Efektif
	Rata-Rata		98,06	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat capaian rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022. Selama empat tahun tersebut menunjukkan capaian rasio efektivitas PAD secara rata – rata sebesar 98,06% dan berada pada kategori “cukup efektif”. Dimana, persentase rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan capaian rasio sebesar 105,34%, sedangkan capaian rasio terendah terjadi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 90,38%. Selanjutnya, dari tabel 5 juga dapat dilihat bahwa secara umum perkembangan tingkat efektivitas PAD mengalami kecenderungan yang negatif atau turun. Dimana, penurunan tersebut terjadi di tahun 2021 dan 2022 dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,41%. Sedangkan, kenaikan terjadi di tahun 2020 dari 97,75% menjadi 105,34%.

Tingkat efektivitas PAD di Pemerintah Kota Tasikmalaya cenderung masih berada pada kriteria “cukup efektif”, dapat dilihat adanya kondisi angka realisasi PAD yang tidak mampu mencapai target yang dianggarkan dalam APBD, meskipun persentase rasio yang dihasilkan tinggi. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022 ketercapaian realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan menunjukkan persentase rasio masing-masing sebesar 97,75%, 98,79%, dan 90,38%. Ketidaktercapaian target PAD tersebut salah satunya disebabkan karena ketercapaian angka realisasi pada komponen di PAD yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal penganggaran atau dikatakan belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja daerah BPKAD Kota Tasikmalaya, penyebab belum tercapainya target PAD terjadi karena belum maksimalnya pencapaian angka realisasi pada komponen retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahunnya. Selain itu, menurut Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Tasikmalaya hambatan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga ketercapaian angka realisasi PAD belum mampu mencapai target yang dianggarkan disebabkan oleh belum maksimalnya *tax effort* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendorong dalam mendorong masyarakat baik dari perorangan atau badan dalam membayar pajak.

Analisis Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan gambaran antara besaran biaya yang dialokasikan untuk memungut PAD dengan realisasi PAD yang diterima (Mahmudi, 2016). Dengan kata lain rasio ini digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan pendapatan secara efisien. Semakin kecil persentase rasio efisiensi, maka semakin tinggi tingkat efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya guna mencapai target. Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya

tahun anggaran 2019 - 2022 dengan menggunakan teori Mahmudi (2016) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Analisis Efisiensi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 - 2022

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi PAD	Efisiensi PAD (%)	Kriteria
2019	6.059.680.347	290.971.707.718	2,08	Sangat Efisien
2020	5.909.033.593	314.307.017.302	1,88	Sangat Efisien
2021	5.713.978.461	445.335.320.093	1,28	Sangat Efisien
2022	6.913.113.620	341.362.213.700	2,03	Sangat Efisien
	Rata-Rata		1,82	Sangat Efisien

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (diolah peneliti, 2024)

Tabel 6 menunjukkan persentase rasio efisiensi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya selama empat tahun anggaran tersebut berada di bawah 10% dengan rata-rata capaian persentase rasio sebesar 1,82% dengan kriteria "sangat efisien". Dengan kata lain, kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah dapat dikatakan efisien atau sangat cermat dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD. Dapat diketahui dari tabel 6 bahwa tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,23%, sedangkan persentase rasio terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,08% yang menandakan bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, tahun 2019 ini kurang efisien.

Selanjutnya, dari tabel 6 juga dapat dilihat bahwa secara umum perkembangan tingkat efisiensi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan dengan kecenderungan yang negatif atau turun. Dengan kata lain, tingkat efisiensi Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin tinggi. Hal ini dapat menunjukkan kinerja pengelolaan PAD di Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Persentase rasio efisiensi PAD yang menurun terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,6%. Penurunan persentase efisiensi PAD ini secara umum terjadi karena angka realisasi PAD selama dua periode tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan pada angka biaya pemerolehan menurun. Dimana, kedua komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi capaian tingkat efisiensi PAD di daerah. Dengan kata lain, realisasi pendapatan yang tinggi perlu diimbangi dengan biaya yang optimal dan tidak berlebihan.

Ketercapaian tingkat efisiensi yang tergolong "sangat efisien" ini menunjukkan Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat efisien di dalam menggunakan dana yang dikeluarkan dalam memperoleh PAD, dengan kata lain Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu meminimalisir anggaran yang dikeluarkan dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD-nya. Menurut Kepala Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya, tingkat efisiensi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tergolong tinggi, salah satunya dilatarbelakangi oleh angka

realisasi PAD yang cenderung meningkat di setiap tahunnya, khususnya sektor pajak daerah yang setiap tahunnya cenderung melebihi target yang dianggarkan. Sehingga, mampu meningkatkan biaya pemerolehan berupa dana insentif pajak yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak yang dapat berdampak positif terhadap perolehan angka realisasi PAD Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang peneliti paparkan berkenaan dengan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2022 yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan, bahwa ditinjau dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah, menunjukkan pertumbuhan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022 memiliki kecenderungan naik. Meskipun terjadi kenaikan, secara rata – rata selama empat tahun anggaran tersebut masih menunjukkan angka sebesar 23,46% dan termasuk dalam kriteria kemampuan keuangan daerah “rendah sekali” dengan pola hubungan termasuk “instruktif”. Dengan kata lain, pemerintah pusat berperan lebih mendominasi daripada kemandirian keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Artinya, pemerintah daerah belum mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Ditinjau dari analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, menunjukkan Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022 memiliki rata-rata sebesar 23,46%, sehingga kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan daerahnya berada di bawah kriteria “baik”. Meskipun, selama empat tahun anggaran tersebut pertumbuhan tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kecenderungan naik sejalan dengan kenaikan angka realisasi PAD, namun kontribusinya masih dinilai sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Ditinjau dari analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, menunjukkan pertumbuhan tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022 memiliki kecenderungan menurun. Meskipun terjadi penurunan, tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer masih tergolong “sangat tinggi” karena persentase rasio berada di atas 50% di setiap tahunnya. Kondisi tersebut menjelaskan tingginya jumlah realisasi dana transfer dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Ditinjau dari analisis rasio efektivitas PAD, menunjukkan pertumbuhan tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022 memiliki kecenderungan menurun. Meskipun terjadi penurunan, selama empat tahun anggaran tersebut menunjukkan rata-rata sebesar 98,06%. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah dikatakan cukup efektif dalam melakukan upaya optimalisasi PAD. Ditinjau dari analisis rasio efisiensi PAD, menunjukkan pertumbuhan tingkat efisiensi PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2019-2022 berada pada kriteria “sangat efisien”, karena mampu berada pada posisi kurang dari 10% di setiap tahunnya. Selain itu juga, selama empat tahun tersebut, tingkat efisiensi PAD cenderung semakin tinggi. Kondisi ini menjelaskan Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat efisien di dalam

menggunakan dana yang dikeluarkan dalam memperoleh PAD atau dengan kata lain Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu meminimalisir anggaran yang dikeluarkan dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD-nya.

SARAN

Dari hasil analisis menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, menunjukkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun anggaran 2019 – 2022 masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk lebih memaksimalkan dan mengembangkan potensi – potensi lokal yang diidentifikasi dapat meningkatkan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna meminimalisir tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer, seperti melakukan kajian terhadap potensi riil PAD yang dimiliki daerah dan menetapkan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya, melakukan optimalisasi PAD dengan membentuk tim survei khusus untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah, meningkatkan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar terjadi peningkatan angka realisasi pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memperbaiki fasilitas dan infrastruktur di sektor pariwisata dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut, dan meningkatkan promosi terkait keunggulan daerah untuk menarik investor dengan tujuan meningkatkan perekonomian di Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad N., & Sianipar, R. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Wacana Kinerja Edisi 2*, 19(2), 1–22.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP – AMP YKPN.
- Indah. (2014). Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9(2), 137–53.
- Iskandar, Azwar. (2022). Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Info Arta*, 6(1), 49–62.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, Matthew B., Huberman, A.M., and Saldana, Jonny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. third edition. USA: SAGE Publications, Inc.
- Nalle, Frederic, Oki, Kamilaus., & Sangaji, Putra. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 17(1), 184–97.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. London: Pearson Education Limited.

- Qisthina, Fildza Amalina, Wahyudi, Setyo Tri., & Khusaini, M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis, & Manajemen*, 10(2), 107-18.
- Setiawan, Puguh, Widiyanti, Rina., Siregar, Liesma Maywarni., Nurhaida, & Oktavia, Elmi. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi*, 7(1), 44-53.